

Instruksi Megawati Tunda Retret Tekan Pemerintah Buat Adili Jokowi

Category: Politik

written by Redaksi | 24/02/2025



ORINEWS.id -Presiden ke-7 RI [Joko Widodo](#) ([Jokowi](#)) dianggap menjadi biang keladi menjauhnya Presiden [Prabowo Subianto](#) dengan Ketua Umum [PDIP](#) Megawati Soekarnoputri.

Kegeraman Megawati memuncak ketika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan [KPK](#) beberapa waktu lalu. Di hari yang sama, Megawati langsung mengeluarkan instruksi untuk kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatan retret.

Terkait itu, Dosen Ilmu [Politik](#) Universitas Udayana (Unud) Efatha Filomeno Borromeu Duarte menilai instruksi Megawati bukan sekadar reaksi politik spontan, melainkan manuver strategis dalam mendefinisikan ulang peran PDIP di era transisi kekuasaan.

“Dengan mengarahkan serangan ke Jokowi, bukan [Prabowo](#), PDIP

menunjukkan upaya sistematis untuk mendekonstruksi warisan politik Jokowi, sekaligus menjaga kelenturan politiknya di bawah pemerintahan yang baru,” kata Efatha kepada RMOL, Senin, 24 Februari 2025.

Menurut dia, ada tiga indikator utama yang menunjukkan pola delegitimasi ini. Pertama, permintaan Hasto Kristiyanto agar Jokowi diperiksa sebelum dirinya ditahan bukan sekadar bentuk perlawanan hukum, melainkan strategi reframing politik yang bertujuan mengalihkan isu dari kasus personal ke problem struktural dalam penegakan hukum.

“Kedua, tuduhan bahwa KPK dikendalikan oleh aktor eksternal melalui AKBP Rossa membangun narasi bahwa PDIP adalah korban represi kekuasaan, bukan sekadar partai yang terseret kasus hukum. Ketiga, dengan menekankan bahwa kasus Hasto sudah berjalan sejak sebelum Prabowo berkuasa, PDIP menghindari benturan langsung dengan pemerintahan baru, memungkinkan mereka untuk tetap relevan dalam dinamika politik mendatang,” bebernya.

Lanjut Efatha, strategi ini pada dasarnya adalah eksperimen reposisi menjauh dari Jokowi untuk membentuk ulang narasi oposisi, tetapi tetap menyisakan ruang diplomasi dengan Prabowo.

“Jika berhasil, PDIP akan mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan oposisi utama yang kredibel. Tetapi, jika gagal mendapatkan dukungan publik, langkah ini bisa menjadi bumerang, mengisolasi PDIP di luar lingkaran kekuasaan tanpa daya tawar yang signifikan lagi,” ungkapnya.

“Pada dasarnya, ini bukan sekadar konflik personal atau hukum. Ini adalah kalkulasi politik jangka panjang PDIP untuk tetap menjadi pemain dominan di era pasca-Jokowi,” tandas Efatha.